

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada perekonomian nasional, UMKM dikatakan seperti tokoh penting dalam kegiatan ekonomi, karena banyaknya manfaat yang disediakan seperti, dapat menyediakan lapangan pekerjaan, berperan sebagai salah satu aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat dan perekonomian lokal, dapat menciptakan pasar baru, serta partisipasinya terhadap neraca pembayaran¹. Perkembangan UMKM perlu dijadikan sebagai perhatian khusus karena peran UMKM dapat dijadikan sebagai upaya dalam membantu kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat Indonesia.

UMKM pada tahun 2022 dapat dikatakan cukup berkembang dan terus bertambah jumlahnya, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bahwa jumlah UMKM di Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 9.3 juta unit usaha². Peran serta potensi UMKM ini diharapkan mampu dan digadangkan sebagai peyumbang Produk Domestik Bruto yang potensial di Indonesia serta berperan juga dalam pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah sangat gencar dan berkomitmen untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.

Potensi yang ditonjolkan oleh UMKM harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan dan pemulihan

¹ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Bilancia* 11, no. 1 (2017): 33–59,

² Erlina F. Santika, "Jumlah UMKM Di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak?," *Databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>.

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan *support* dan dorongan dari pemerintah untuk menjadikan UMKM kuat dan maju, sehingga dapat memainkan perannya dengan maksimal. Untuk mewujudkannya, pemerintah beserta instansi terkait harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dilansir dari *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, permasalahan umum yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yakni kualitas SDM, pendanaan, kualitas dan kuantitas produk, serta pemasaran UMKM³. Permasalahan-permasalahan inilah yang harus diselesaikan secara substantif, komprehensif dan sistematis.

Dibalik banyaknya permasalahan yang muncul pada sektor UMKM, keberadaannya masih menjadi suatu hal yang penting pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari UMKM di Indonesia yang konsisten menjadi penyokong Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar yakni sebesar kurang lebih 61%⁴. Hal ini sebenarnya, juga didukung oleh menjamurnya jumlah UMKM di Indonesia. Berikut ini adalah rekapitulasi UMKM pada 34 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022.

³ Edward UP Nainggolon, "UMKM Kuat, Ekonomi Berdaulat," *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14214/UMKM-Kuat-Ekonomi-Berdaulat.html>.

⁴ Aisyah Nursyamsi, "UMKM Penyumbang PDB Terbesar, Tapi Belum Optimal Karena Belum Tersentuh Digitalisasi," *Tribunnews*, 2021.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	229.101
2	Sumatera Utara	595.779
3	Sumatera Barat	296.052
4	Riau	252.574
5	Jambi	57.597
6	Sumatera Selatan	330.693
7	Bengkulu	83.523
8	Lampung	285.909
9	Kep. Bangka Belitung	30.770
10	Kep. Riau	76.217
11	DKI Jakarta	658.365
12	Jawa Barat	1.494.723
13	Jawa Tengah	1.457.126
14	Di Yogyakarta	235.899
15	Jawa Timur	1.153.576
16	Banten	339.001
17	Bali	407.640
18	Nusa Tenggara Barat	287.882
19	Nusa Tenggara Timur	81.742
20	Kalimantan Barat	29.813
21	Kalimantan Tengah	66.060
22	Kalimantan Selatan	72.113
23	Kalimantan Timur	46.824
24	Kalimantan Utara	7.588
25	Sulawesi Utara	116.666
26	Sulawesi Tengah	29.706
27	Sulawesi Selatan	268.299
28	Sulawesi Tenggara	8.978
29	Gorontalo	85.583
30	Sulawesi Barat	20.111

31	Maluku	18.789
32	Maluku Utara	4.141
33	Papua Barat	4.604
34	Papua	3.932
Total		9.389.880

Sumber data: Kementerian Koperasi dan UMKM (kemenkopukm.go.id)

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat masih menduduki peringkat 10 besar dengan peyumbang jumlah UMKM terbanyak di Indonesia. Untuk peringkat di Pulau Sumatera, Sumatera Barat menempati posisi *ketiga* dengan jumlah UMKM terbanyak. Jumlah UMKM yang cukup banyak ini dapat dijadikan modal untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera di Sumatera Barat.

Jumlah UMKM yang banyak ini harus diikuti pula dengan adanya peningkatan kualitas sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan UMKM yang dilandaskan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 yang menyampaikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain serta teknologi. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama berupaya untuk melakukan pendampingan pengembangan untuk pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 91⁵. Pemerintah daerah sangat berperan besar dalam

⁵ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," no. 086507 (2021): 1–121.

pelaksanaan pengembangan UMKM ini, mengingat bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui keadaan dan kondisi dari UMKM di daerahnya. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jumlah UMKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kab/Kota yang memiliki jumlah UMKM paling banyak hingga paling sedikit.

Tabel 1.2

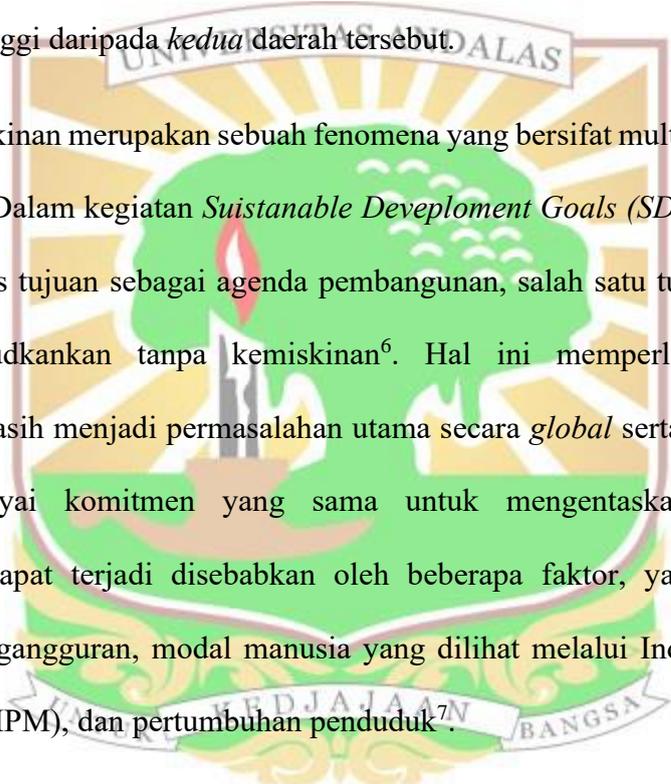
Tabel Jumlah UMKM berdasarkan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah
1.	Kab. Agam	15.192
2.	Kota Padang Panjang	14.096
3.	Kabupaten Solok	12.864
4.	Kota Padang	11.365
5.	Kab. Dharmasraya	7.770
6.	Kab. Pasaman	7.550
7.	Kota Pariaman	7.055
8.	Kota Bukittinggi	7.015
9.	Kab. Pesisir Selatan	6.968
10.	Kab. Tanah Datar	4.718
11.	Kota Sawahlunto	3.596
12.	Kota Solok	3.271
13.	Kab. Pasaman Barat	2.662
14.	Kab. Lima Puluh Kota	2.660
15.	Kab. Padang Pariaman	2.114
16.	Kab. Sijunjung	1.678
17.	Kab. Kepulauan Mentawai	1.215
18.	Kab. Solok Selatan	982
19.	Kota Payakumbuh	944
	Total	112.258

Sumber: Database Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Solok berada pada posisi *ketiga* dengan kuantitas UMKM terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Solok masih belum mengoptimalkan kelebihan tersebut untuk dijadikan sebagai suatu keuntungan untuk perekonomian. Dapat diamati pada

tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok yang hingga saat ini selalu menjadi suatu persoalan penting yang belum terselesaikan. Kabupaten Solok menempati posisi *kedua* dengan kuantitas masyarakat miskin terbanyak di Sumatera Barat pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam yang juga mempunyai jumlah UMKM yang banyak, persentase kemiskinan Kabupaten Solok lebih tinggi daripada *kedua* daerah tersebut.



Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang bersifat multidimensi dalam suatu negara. Dalam kegiatan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, ditetapkan ada tujuh belas tujuan sebagai agenda pembangunan, salah satu tujuannya yaitu mewujudkan tanpa kemiskinan⁶. Hal ini memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan utama secara *global* serta negara-negara lain mempunyai komitmen yang sama untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan perkapita, pengangguran, modal manusia yang dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan penduduk⁷.

Salah satu capaian jangka panjang dari dikembangkannya UMKM ialah untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Solok yang cukup tinggi,. Angka kemiskinan di Kabupaten Solok pada tahun 2022 masih menduduki peringkat nomor *dua* tertinggi di Sumatera Barat, yaitu sebesar 7,12%. Hal ini

⁶ Stanislaus Riyanta and Paramita Nur Kurniati, "Strategi Tata Kelola Kolaboratif Antara Aktor Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Analis Kebijakan* 2, no. 2 (July 9, 2019)

⁷ Lily Leonita And Rini Kurnia Sari, "Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 1.

tentunya menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Solok, karena kemiskinan merupakan hal yang kompleks sehingga dampaknya berimbas ke berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 2023, persentase kemiskinan Kabupaten Solok masih juga mengalami kenaikan hingga 7,13%, walaupun untuk peringkat kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan, yakni peringkat *ketiga* karena digantikan oleh Pesisir Selatan untuk peringkat *dua*⁸. Banyak sekali faktor yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam penanganan kemiskinan ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan dan memaksimalkan kehadiran UMKM di Kabupaten Solok.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi misi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pemerintah daerah. Visi Kabupaten Solok pada tahun 2021-2026 yakni: “*Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat*”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan yang tertulis diatas, misi Kabupaten Solok tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Memajukan infrastruktur yang berkeadilan
3. Memajukan perekonomian masyarakat lewat sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata

⁸ BPS, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Persen),” *Sumbar.Bps.Go.Id.*

4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
5. Memajukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
6. Meningkatkan tatanan hidup masyarakat yang berasaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Pada misi Pemerintah Kabupaten Solok nomor *tiga*, cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya dilakukan melalui peningkatan sektor UMKM⁹. Pemerintah Kabupaten Solok melimpahkan wewenang kepada Dinas KUKMPP Kabupaten Solok sebagai instansi yang mengurus urusan koperasi, UKM, perdagangan, dan perindustrian.

Menurut Perbup Solok Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perbup Solok Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, didalam peraturan tersebut bidang dari Dinas yang melakukan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan UMKM adalah Bidang Usaha Mikro Kecil (UKM). Berikut ini adalah fungsi dari Bidang UKM, yakni:

1. Perancangan serta pelaksanaan program dan kegiatan divisi UKM
2. Pemeliharaan, pengordinasian, pengelolaan serta pengontrolan program dan kegiatan dalam lingkup divisi usaha kecil menengah
3. Evaluasi program dan kegiatan di lingkup divisi UKM.

⁹ Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, "RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026", 2021.

Pernyataan diatas membuktikan bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap peningkatan perkembangan UMKM di Kabupaten Solok adalah Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUKMPP), terkhususnya pada Bidang UKM. Dalam upaya pembangunan, Dinas KUKMPP Kabupaten Solok mempunyai beberapa program yang disusun dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tabel 1.3
Program dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Program	Indikator Kinerja (Persentase)
1.	Pengawasan dan pemeriksaan	Peningkatan organisasi yang berkualitas
2.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya dengan wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten
3.	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi yang mengikuti pelatihan dengan wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten
4.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Koperasi yang diberikan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha dengan wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten
5.	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha
6.	Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
7.	Perencanaan dan pembangunan industri	Sentra industri yang difasilitasi
8.	Pengendalian izin usaha industri	Izin usaha industri yang dikendalikan
9.	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Data informasi industri yang tersedia
10.	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

11.	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas
12.	Pengembangan ekspor	Event yang diikuti
13.	Standardisasi dan perlindungan konsumen	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku
14.	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran

Sumber: Renstra DKUKMPP Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

Pada tabel 1.4 terdapat beberapa program yang menjadi program kerja Dinas KUKMPP untuk periode 2021-2026. Pada tabel tersebut dapat dilihat pada poin ke enam, terdapat perencanaan program yakni, program pengembangan UMKM. Program pengembangan UMKM merupakan salah satu bentuk usaha Dinas DKUKMPP dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terkhususnya para pelaku UMKM. Pengembangan UMKM ialah suatu langkah dalam memantapkan dan meningkatkan kapasitas UMKM lewat penyediaan fasilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Diibentuknya program pengembangan UMKM ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM dalam pengembangan usaha serta mewujudkan UMKM yang berdaya saing, maju, dan kreatif¹⁰. Hal ini selaras dengan data jumlah UMKM di Kabupaten Solok yang memiliki kuantitas tinggi. Berikut ini adalah jumlah UMKM di Kabupaten Solok:

¹⁰ DKUKMPP, "Rencana Kerja 2021" (2021).

Tabel 1.4
Jumlah UMKM Kabupaten Solok

Tahun	Jumlah
2021	12.520
2022	12.617

Sumber data: Profil DKUKMPP Kabupaten Solok Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, UMKM Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari segi jumlah dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren positif, karena dengan semakin banyaknya UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur. Namun, tak hanya cukup dengan penambahan UMKM saja, peningkatan kualitas UMKM juga harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Solok, terutama oleh Dinas KUKMPP. Program Pengembangan UMKM ini merupakan solusi yang dianggap tepat untuk meningkatkan kualitas UMKM.

Pada tahun 2021 program pengembangan UMKM dalam penyelenggarannya oleh Dinas KUKMPP kegiatannya berupa memfasilitasi usaha mikro dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi, tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk dana *covid19*, saat itu¹¹. Sehingga, pada tahun 2022 Dinas KUKMPP lebih gencar untuk melaksanakan kegiatan pada program pengembangan UMKM. Hal ini juga didukung oleh adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan *Smesco*. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, Dinas KUKMPP memiliki kesempatan lebih besar untuk

¹¹ DKUKMPP, “Rencana Kerja 2023” (2023).

menyediakan fasilitas pelatihan yang lebih beragam serta didukung pula dengan adanya *Smesco* yang mendukung penuh pelatihan-pelatihan tersebut.

Pada salah satu teori yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinicki, ada indikator sumber daya modal, sebuah organisasi dikatakan efektif apabila mempunyai *input* yang digunakan dapat berefek pada hasil atau *output*nya. Dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM, disediakan anggaran sebesar Rp.5.117.237,863, dana ini dianggarkan dari APBD Kabupaten Solok. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan *staff* Bidang UKM berikut ini:

“Dana dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program pengembangan UMKM ini ya dianggarkan dari APBD. Apalagi sekarang pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya untuk menekan angka kemiskinan Kabupaten Solok, sehingga semua dinas ikut andil untuk memaksimalkan program dari dana APBD yang ada” (Wawancara dengan *staff* Bidang UKM, Afrirahariani pada 20 Mei 2023)

Dari wawancara diatas, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Solok pada tahun 2022 sangat gencar dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Solok, sehingga dana yang dikeluarkan difokuskan pada Dinas-Dinas yang dirasa punya andil yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2022 program pengembangan UMKM dijadikan sebagai salah program yang diunggulkan untuk menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok¹². Oleh karena itu, program ini sangat butuh dikaji keefektivannya karena *output* yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

¹² Bapelitbang, “Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Solok Tahun 2022” (2022).

Program pengembangan UMKM dilaksanakan oleh Bidang UKM Dinas KUKMPP Kabupaten Solok, kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam program ini dilakukan dengan sistem kerja sama bersama Smesco (*Small and Medium Enterprises and Cooperatives*). Tujuan adanya Smesco sendiri ialah untuk memamerkan prouduk-produk unggulan Indonesia ke kancah dunia Internasional. Nama resmi SMESCO adalah Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) yang terbentuk dan beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri KUKM No 19.3/Per/M.KUKM/VII/2006 dan Keputusan Menkeu nomor 159/KMK.05/2007. Smesco disini berperan sebagai media partner yang membantu memfasilitasi serta melalukan diskusi bersama Dinas KUKMPP untuk mencapai tujuan program pengembangan UMKM.

Secara umum potensi kemajuan usaha di Kabupaten Solok sangat beragam. Jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 kurang lebih ada 12.520 orang pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Solok, dengan rincian usaha sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jenis Usaha UMKM di Kabupaten Solok

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Usaha
1	Makanan	4240
2	Minuman	140
3	Olahan Kayu	304
4	Bahan Bangunan	299
5	Konveksi	37
6	Kerajinan	204
7	Bengkel	377

8	Jasa	916
9	Huller	449
10	Penggilingan Bumbu dan Rempah	20
11	Depot Air Minum	121
12	Aksesoris	20
13	Lain-Lain	5393
	Total	12.520

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan UMKM Bangkit Solok Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat jenis usaha yang ada di Kabupaten Solok cukup beragam, namun jenis usaha makanan memang lebih banyak jumlahnya daripada jenis usaha lainnya. Usaha makanan lebih menjamur dikarenakan modal yang dibutuhkan lebih sedikit, sehingga jenis usaha ini menjadi alternatif yang pas dan cocok untuk dijadikan usaha oleh kebanyakan pelaku UMKM. Pada program pengembangan UMKM ini tidak semua jenis usaha dapat melakukan pendaftaran dikarenakan ada *tiga* jenis bidang UMKM yang diutamakan pengikut sertaannya, yakni, bidang *food & beverage*, bidang *fashion*, dan bidang kerajinan.

Kegiatan pengembangan usaha untuk UMKM yang diselenggarakan bersama Smesco dirancang dalam beberapa pelatihan (Program UMKM Bangkit Kabupaten Solok). Beberapa pelatihan tersebut antara lain yakni, pelatihan haki, konten kreatif, bpom, *packaging*, pemasaran online dan pelatihan olahan produk¹³. Kegiatan ini dilaksanakan selama *enam* bulan dan diikuti oleh 200 UMKM dari Kabupaten Solok. Smesco dan Dinas KUKMPP membuka pendaftaran untuk para

¹³ DKUKMPP, *Dokumen DPA Bidang UKM*, 2022.

pelaku UMKM yang telah menyiapkan persyaratan untuk ikut serta dalam Program UMKM Bangkit Kabupaten Solok. Peserta terdiri atas 19 orang pada bidang kerajinan, 41 orang pada bidang *fashion*, dan 140 orang pada bidang *Food & Beverage*.

Kegiatan ini dilaksanakan karena hingga saat ini permasalahan UMKM di Kabupaten Solok masih nampak adanya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya daya saing pada sektor UMKM, minimnya modal UMKM dan koperasi bagi dunia perbankan, akses pemasaran serta promosi yang belum optimal, serta, standar produk yang dapat dikatakan belum merata pada koperasi serta UMKM. Permasalahan yang disebabkan pasca *Covid19* pada tahun 2020 lalu juga berdampak pada UMKM, karena melemahnya sektor pariwisata yang kekurangan pengunjung. Solusi terkait permasalahan ini salah satunya yaitu dengan menghadirkan program yang bermanfaat serta berdampak besar untuk mendorong UMKM untuk terus maju.

Permasalahan UMKM di Kabupaten Solok inilah yang melatar belakangi diadakannya program pengembangan UMKM ini. Pada tahun anggaran 2022 Dinas KUKMPP Kabupaten Solok melakukan beberapa pelatihan untuk mendorong UMKM naik kelas atau bangkit kembali pasca *Covid19*. Penjelasan mengenai rincian dari kegiatan tersebut peneliti paparkan pada uraian dibawah ini.

Dalam kegiatan bersama *Smesco* pada tahun 2022, untuk menunjang UMKM naik kelas, dinas melaksanakan pelatihan HAKI yang bertujuan untuk menyadarkan UMKM Kabupaten Solok akan pentingnya penjagaan kekayaan

intelektual atas usaha yang mereka punya. Pada kegiatan ini para UMKM di bombing dan didampingi untuk mengurus HAKI merek. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 ini, hasilnya *dua* pengusaha Kabupaten Solok telah terbit HAKI nya, yakni UMKM Subarda Coffe dari Kecamatan Danau Kembar dan UMKM Pelida (bawang goreng) dari Kecamatan Lembah Gumanti.

Pada kegiatan ini, Dinas KUKMPP terlihat belum maksimal dalam mencapai sasarannya, hal ini dilihat dari hanya ada *dua* UMKM yang mendapatkan HAKI. Sangat disayangkan jika hanya 2 UMKM yang mendapatkannya, sedangkan ada 200 UMKM yang mengikuti seminar ini. Sehingga indikator sasaran pada teori Kreitner dan Kinicki belum dilaksanakan secara maksimal

Kegiatan selanjutnya yang diadakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Solok, yakni pelatihan BPOM. Kegiatan ini dilakukan di ruang Baznas Koto Baru pada tanggal 2 Juni 2022. Narasumber acara ini yakni Armawati dan Zulfitria yang didatangkan dari perwakilan BPOM Sumatera Barat. Seminar ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, kesadaran, dan wawasan para pelaku UMKM akan pentingnya proses perizinan pangan olahan dan diharapkan pelaku UMKM memahami langkah-langkah mendapatkan pengurusan izin dan syaratnya.

Packaging dalam suatu produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pasalnya, *packaging* tak hanya berfungsi sebagai pelindung produk namun juga punya andil besar untuk dapat menarik minat konsumen untuk memilih suatu produk. Oleh karena itu, Dinas mengadakan pelatihan *packaging* untuk

menambah kualitas produk UMKM agar berdaya jual lebih tinggi dan menarik konsumen.

Gambar 1.1
Pelatihan *Packaging*



Sumber: Website DKUKMPP Kab. Solok

Pelatihan ini dilakukan pada tanggal 10 November 2022 di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka. Mentor pada pelatihan packaging ini, yakni General Manager PT. EPAC Flexibles Indonesia, Ijo Wira. Gambar diatas merupakan salah satu contoh *packaging* yang sesuai standar yang digunakan pelaku UMKM. Pelatihan ini diharapkan agar para pelaku UMKM dapat memasarkan produknya ke luar daerah dengan rasa percaya diri yang tinggi karena telah dikemas dengan sedemikian baiknya.

Kegiatan pelatihan konten kreatif juga dilaksanakan agar cara yang digunakan untuk pemasaran produk UMKM secara digital dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 Agustus 2022 di Aula Solok Nan Indah Arosuka.

Gambar 1.2
Pelatihan Konten Kreatif



Sumber: Website DKUKMPP Kabupaten Solok

Pelatihan Konten kreatif dilakukan untuk mengasah soft skill pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Pelatihan ini diawali dengan pengelolaan konten kreatif, kemudian mengenai panduan media sosial.

Pelatihan pemasaran online dilakukan di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka pada tanggal 2 Desember 2022. Pelatihan ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk menambah kemampuan daya saing pelaku UMKM dalam memasarkan produk yang dimilikinya secara onlinr. Sehingga nantinya akan berdampak pada penambahan omset kedepannya.

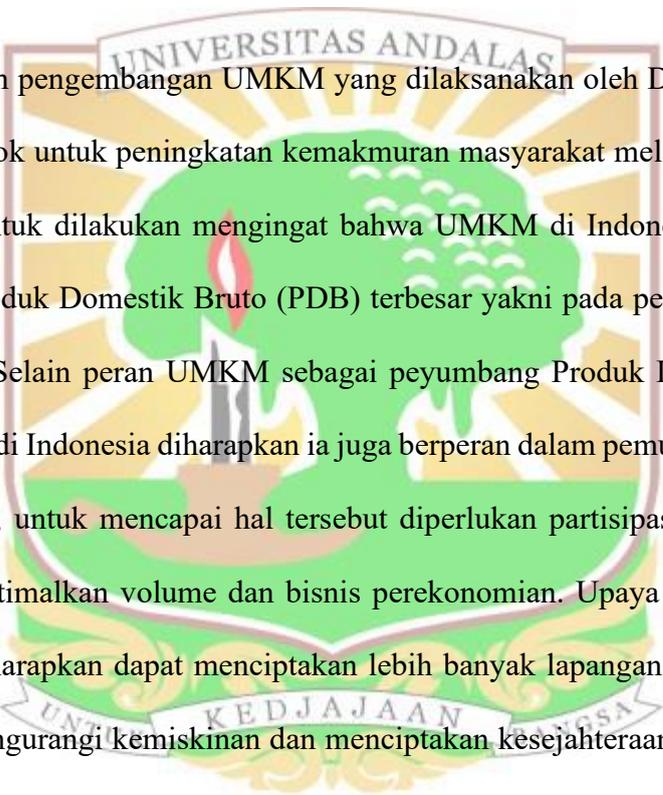
Rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan bersama Smesco, yakni Pelatihan Produk.

Gambar 1.3
Pelatihan Produk



Sumber: Website DKUKMPPP Kabupaten Solok

Pelatihan produk dilakukan dengan salah satu chef yang cukup expert pada bidangnya, para pelaku UMKM diajarkan untuk menambahkan sentuhan inovasi pada makanan olahan sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi dari biasanya. Salah satu bahan olahan yang dilakukan demo memasak bersama chef tersebut yaitu olahan singkong, karena singkong merupakan salah satu komoditi utama dari Kabupaten Solok



Program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Solok untuk peningkatan kemakmuran masyarakat melalui UMKM ini sangat tepat untuk dilakukan mengingat bahwa UMKM di Indonesia merupakan kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar yakni pada persentase kurang lebih 61%¹⁴. Selain peran UMKM sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto yang potensial di Indonesia diharapkan ia juga berperan dalam pemulihan ekonomi. Dengan begitu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan partisipasi dari berbagai pihak, mengoptimalkan volume dan bisnis perekonomian. Upaya pengembangan UMKM ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru serta dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dukungan yang dilontarkan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha sangat diperlukan untuk membangkitkan serta mendorong UMKM untuk bangkit kembali paska *covid19*. Oleh karena itu, Dinas KUKMPP Kabupaten Solok harus lebih memperhatikan proses dan pelaksanaan program yang terkait dengan UMKM ini.

¹⁴ Nursyamsi, "UMKM Penyumbang PDB Terbesar, Tapi Belum Optimal Karena Belum Tersentuh Digitalisasi."

Pada tahun 2021, kondisi UMKM di Kabupaten Solok mengalami penurunan omset. Hal ini dapat dilihat pada laporan kinerja DKUKMPP yang hanya berada pada 0,08%, padahal pada tahun-tahun sebelumnya capaian omset UMKM Kabupaten Solok rata-rata berada pada angka 2%¹⁵. Penurunan omset ini diakibatkan oleh adanya *pandemic covid19* yang menghambat pelaksanaan program dinas yang telah direncanakan, serta adanya refocusing anggaran dari pemerintah daerah untuk dana *covid19*. Program pengembangan UMKM ini merupakan langkah nyata untuk mendorong percepatan pemulihan UMKM paska pandemi¹⁶. Hal ini juga dibuktikan oleh wawancara bersama Kepala Bidang UKM DKUKMPP dibawah ini:

“...Perkembangan UMKM *pasca covid* memang sangat terbatas, omset merokapun menurun dari sebelum *covid*, oleh karena itu kami mengadakan program UMKM Kabupaten Solok Bangkit bersama Smesco dengan harapan perkembangan UMKM meningkat kembali... (Wawancara dengan Kepala Bidang UKM, Rinarti, pada 28 Juni 2023)”

Pada rencana strategis yang disusun oleh Dinas KUKMPP, program pengembangan UMKM memang sudah menjadi salah satu upaya dan rencana kerja yang dilakukan untuk menciptakan UMKM yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmat Rahayu dan Afriva Khaidir yang berjudul Upaya Dinas KUKMPP Kabupaten Solok Dalam Pemulihan Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terdampak Pandemi Covid19¹⁷, terdapat beberapa poin penting yang menjadi penghambat

¹⁵ DKUKMPP, *Laporan Kinerja DKUKMPP Tahun 2021* (Kabupaten Solok, 2021).

¹⁶ DKUKMPP, “Program ‘UMKM Solok Bangkit’ Tuntas,” <https://Dkukmpp.Solokkab.Go.Id>, 2022.

¹⁷ Suci Rahmat Rahayu and Afriva Khaidir, “Upaya Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok Dalam Pemulihan Perekonomian Usaha Mikro Kecil

Dinas KUKMPP dalam pemulihan perekonomian UMKM yang terdampak *Covid19*. Beberapa faktor tersebut, yakni kurangnya modal usaha, sumber daya manusia yang terbatas, rendahnya kemampuan pasar terlihat dari kesulitan dalam menjumpai produk murah, dampak pasar bebas, dan keterbatasan anggaran. Diperlukannya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan diatas agar permasalahan tersebut tidak terjadi berlarut-larut.

Salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DKUKMPP mempunyai batas kuota peserta yang telah ditentukan. Sehingga dengan keterbatasan kuota ini membuat pelaku UMKM lain yang tidak mendapatkan pelatihan menjadi kurang berkembang, Kemudian, Beberapa kegiatan untuk pengembangan UMKM dilakukan dengan sistem kerja sama, sehingga kegiatan yang diadakan tidak berkelanjutan dan terbatas untuk beberapa UMKM saja.

Dalam segi sumber daya manusia juga terdapat kendala dalam pelaksanaan programnya, yakni belum tersedianya SDM aparatur yang handal dan memadai sesuai dengan spesifikasi keahliannya dalam melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM karena adanya mutasi dan Rotasi di Kab Solok¹⁸. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, membuat dinas harus mencari sumber daya dari luar untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM dan hal ini tentunya akan membuat berlebihnya anggaran dan waktu yang dikeluarkan. Dengan adanya sistem rotasi di Kab. Solok, juga akan membuat para pegawai yang sudah terbiasa

Dan Menengah (Umkm) Yang Terdampak Pandemi Covid-19,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 847–854.

¹⁸ DKUKMPP, “Rencana Kerja 2021.”

dan mulai paham dengan kegiatan dinas, harus dirotasi kembali dan diganti dengan pegawai baru yang harus mempelajari kembali dari awal.

Permasalahan selanjutnya, yaitu belum optimalnya perencanaan partisipatif dan keselarasan antar dokumen perencanaan¹⁹. Sehingga dengan permasalahan tersebut mengakibatkan masih rendahnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Solok dapat menjadi lebih berkembang dan eksis di masyarakat. Namun, faktanya UMKM lokal masih sulit untuk menjangkau pasar yang luas dan sulit untuk berkembang, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Program Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian, yaitu “Bagaimana Efektivitas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dinas

¹⁹ DKUKMPP, “Rencana Kerja 2023.”

Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dalam melakukan pelaksanaan program pengembangan UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengembangan UMKM.
- b. Berguna sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat isu yang sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perguruan tinggi di program studi, dapat menambah khasanah karya ilmiah di Universitas Andalas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok sebagai pelaksana program pengembangan



